

# KOMUNIKASI KERJA ANTAR KEMENTERIAN DILIHAT DARISUDUT PERTAHANAN NEGARA

**Tati Herlia, S.IP, MM**

Analisis Pertahanan Negara Madya Set Balitbang Kemhan

Email: tatiherlia@yahoo.co.id

## *Abstract*

*Work communication between Ministries is currently not optimal. This is due to the specific duties of each Ministry. But in implementing the government development program contained in Nawacita, communication between ministries must be carried out. This time the author tries to put forth writing on inter-ministerial communication seen from the point of view of national defense. Case study activities were analyzed through predictions of perceptions of activities in the ministry of agriculture, the ministry of transportation, the ministry of communication and information and the DPR - RI. The theory used is the theory of communication. The method used is qualitative analytical methods. The results of predictions of perceptions of analysis found several strengths in the case studies of the ministry of agriculture faced with national defense and several weaknesses in the case studies of the ministries of transportation and communication faced with national defense. So that the Ministry of Defense is expected to need to participate in helping a number of conditions of weaknesses and shortcomings between these ministries as a form of communication between ministries.*

*Keyword: Inter-ministry work communication, state defense*

## **PENDAHULUAN**

Komunikasi dan koordinasi yang optimal antar Kementerian sangat diperlukan guna mempercepat laju pembangunan nasional. Komunikasi antar Kementerian dapat dilakukan secara terpadu atau dikatakan secara sinergi. Sinergi itu sangat diperlukan dan tidak boleh dianggap sebagai sebuah masalah, karena ada campur tangan antara satu dengan yang lainnya. Bangsa ini butuh sinergitas antara satu kementerian dengan kementerian lainnya guna mempercepat laju pembangunan nasional.

Tantangan utama yang dihadapi oleh instansi pemerintah saat ini adalah minimnya komunikasi antar lembaga yang mengakibatkan terhambatnya program strategis pemerintah. Sementara, dinamika serta permasalahan yang dihadapi kementerian atau lembaga pemerintah saat ini sangat beragam, salah satunya adalah masih seringnya tumpang tindih kewenangan dan masih lemahnya relasi antar lembaga negara. Untuk menjawab tantangan tersebut,

komunikasi antar lembaga perlu lebih dioptimalkan untuk menyamakan persepsi terkait visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam program Nawacita.

Dari sudut Pertahanan Negara bahwa Komunikasi antar Kementerian secara umum sangat diperlukan. Namun setiap Kementerian mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Secara khusus atau strategis pada karakter tugas, memang ini tidak dapat disinergikan tetapi untuk pelaksanaannya tentunya sangat diperlukan sinergitas melalui komunikasi dengan institusi atau antar kementerian namun itupun dengan kementerian yang terkait. Komunikasi antar Kementerian dari sudut Pertahanan Negara dapat dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Pertahanan Negara yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, Sumber Daya Nasional (SDN) dilaksanakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.

## **KAJIAN LITERATUR**

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal.

**Komunikasi** berasal dari bahasa Latin *communis* yang berarti 'sama'. *Communico*, *communicatio* atau *communicare* yang berarti membuat sama (*make to common*). Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya (*communication depends on our ability to understand one another*).

Pada awalnya, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan organis. Sinyal kimiawi pada organisme awal digunakan untuk reproduksi. Seiring dengan evolusi kehidupan, maka sinyal-sinyal kimiawi primitif yang digunakan dalam berkomunikasi juga ikut berevolusi dan membuka peluang terjadinya perilaku yang lebih rumit seperti tarian kawin pada ikan..

Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi dapat berupa interaktif, komunikasi transaktif (komunikasi bertujuan atau komunikasi tak bertujuan). Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut.

Walaupun komunikasi sudah dipelajari sejak lama dan termasuk “barang antik”, topik ini menjadi penting khususnya pada abad 21 karena pertumbuhan komunikasi digambarkan sebagai “penemuan yang revolusioner”, hal ini dikarenakan peningkatan

teknologi komunikasi yang pesat seperti radio, Televisi, telepon, satelit dan jaringan komputer seiring dengan industrialisasi bidang usaha yang besar dan politik yang mendunia. Komunikasi dalam tingkat akademi mungkin telah memiliki departemen sendiri di mana komunikasi dibagi-bagi menjadi komunikasi masa, komunikasi bagi pembawa acara, humas dan lainnya, namun subyeknya akan tetap. Pekerjaan dalam komunikasi mencerminkan keberagaman komunikasi itu sendiri.

Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik.

Menurut Laswell komponen-komponen komunikasi adalah:

- Pengirim atau komunikator (*sender*) adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain.
- Pesan (*message*) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.
- Saluran (*channel*) adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. dalam komunikasi antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada/suara.
- Penerima atau komunikan (*receiver*) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain.
- Umpan balik (*feedback*) adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya.
- Aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang tata cara memberi dan menerima informasi.<sup>1</sup>

Pengelolaan Pertahanan Negara selalu ada saja ancaman. Menyikapi beberapa ancaman dimana Sumber Ancaman adalah berasal dari entitas yang berkeinginan atau memiliki niat dan benar-benar secara nyata akan melakukan kegiatan yang melanggar norma dan hukum, aturan dan ketentuan serta kaidah atau kontrol keamanan informasi serta aset fisik lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat materil dan immateril. Ancaman dan serangan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku yang mewakili pemerintah (*State*

<sup>1</sup> Wikipedia, 2018

*Actor*) atau non pemerintah (*Non State Actor*), sehingga pelaku bisa bersifat perorangan, kelompok, golongan, organisasi atau bahkan sebuah negara. Secara umum unsur-unsur yang dapat diidentifikasi memiliki potensi sebagai sumber ancaman terdiri atas Sumber Internal dan Eksternal, Kegiatan Intelijen, Kekecewaan dan Investigasi<sup>2</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metodologi Analitis Deskriptif Kualitatif melalui studi kasus dari beberapa tindakan komunikasi antar kementerian seperti, kementerian pertanian, kementerian perhubungan, kementerian informasi dan komunikasi dan komunikasi dari DPR.

Hasil dari Komunikasi antar kementerian tersebut, satu persatu dianalisis dengan menggunakan sudut pandang pertahanan negara dengan menggunakan manajemen strategis yaitu analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) yaitu variabel internal, kekuatan-kekuatan dan beberapa kelemahan serta variabel eksternal, beberapa peluang dan tantangan-tantangan.

Analisis menggunakan Prediksi Persepsi dengan memakai skala Likert yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS) dan hasilnya digambarkan dengan diagram Radar.

## PEMBAHASAN

Terdapat beberapa kasus dari beberapa kementerian yang mewakili tentang cara atau strategi pelaksanaan Komunikasi antar Kementerian dilihat dari sudut pandang Pertahanan Negara. Implementasi Pengelolaan system pertahanan negara yang bersifat terpadu pada aspek Pertahanan nir militer seperti contoh bentuk komunikasi antar kementerian salah satunya pada Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Pada tanggal 1 sd 3 Maret 2018 di Bogor telah dilaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB)

yang bersifat lintas sektor, pendekatan "*One Health*" dan hal itu menjadi dasar dari sebuah strategi dan berfungsi sebagai sebuah kerangka kerja untuk perencanaan komunikasi.

Direktur Kesehatan Hewan Fadjar Sumping Tjatur Rasa yang mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian membuka acara Lokakarya "Penyusunan Strategi Komunikasi Nasional Dalam Mendukung Program Pengendalian Pencegahan PIB dan *Zoonosis* Tertarget Dengan Pendekatan *One Health*". Kegiatan yang melibatkan lintas sektor ini merupakan bagian dari program EPT2 kerjasama antara Ditjen PKH dengan FAO. Narasumber utama yang hadir yaitu: Dr Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Data dan Informasi BNPB, Effendi Gazali, PhD., MPS ID, Dosen Ilmu Komunikasi UI, serta peserta yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Kementerian Kesehatan, Kementerian LHK, pemerintah daerah, USAID, FAO, P&R dan APEID. Pendekatan *One Health* dalam menyusun strategi komunikasi diperlukan pada setiap tingkatan dalam pemerintahan sebagai bagian dari penguatan kapasitas pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyakit di Indonesia.

Lokakarya ini dapat memformulasikan suatu strategi komunikasi nasional yang bersifat lintas sektoral menggunakan pendekatan *One Health* yang dapat diaplikasikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dengan menyuarakan informasi yang sama. Sementara itu, Kasubid *Zoonosis* Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Rama Fauzi menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, dokumen strategi komunikasi ini nanti akan melengkapi dokumen Panduan Koordinasi Lintas Sektor menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah *Zoonosis* dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) yang telah disusun dan siap untuk diluncurkan. Senada dengan Rama, Sri Handani dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mendukung adanya strategi komunikasi yang tepat dalam upaya mengendalikan penyakit.

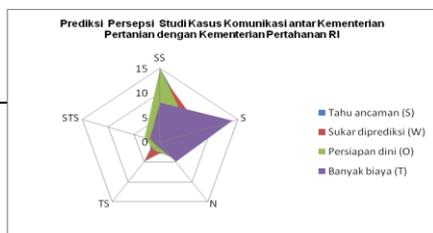
<sup>2</sup> Buku Putih Pertahanan, 2015

Namun dia menggaris-bawahi pentingnya penyamaan persepsi terkait kondisi KLB maupun wabah itu sendiri.

Kementerian Pertahanan dapat terlibat dalam fungsi kerjasama di bidang Pertahanan Upaya menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) yang siap untuk diluncurkan tersebut. Pengelolaan Pertahanan Negara melalui pendekatan “Pertahanan Nir Militer” seyogyanya perlu ikut serta berkomunikasi dalam mempertahankan Program Pengendalian Pencegahan Penyakit Infeksi Baru (PIB) tersebut yang tertarget melalui pendekatan *One Health* dengan melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, Sumber Daya Nasional yang dilaksanakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut melalui Sosialisasi secara terus menerus dan simultan. Untuk analisis dari sudut Pertahanan Negara dengan menggunakan prediksi persepsi keterlibatan Kementerian Pertahanan RI pada pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB) Kementerian Pertanian dapat terlihat pada tabel 1 dan hasilnya terlihat pada gambar 1 di bawah ini.

SWOT	SS	S	N	T	S
				S	T
				S	S
Tahu Ancaman (S)	15	7	3	3	2
Sukar Diprediksi	14	8	2	5	1
Persiapan dini (O)	15	6	4	2	3
Banyak biaya (T)	8	14	5	1	2

**Tabel 1. Prediksi Persepsi keterlibatan Kementerian Pertahanan RI pada pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB)**



**Gambar 1. Diagram Radar hasil Prediksi Persepsi keterlibatan Kementerian Pertahanan RI pada pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB)**

Komunikasi dan koordinasi yang optimal guna mempercepat laju pembangunan nasional. Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka dan memberikan sambutan pada acara Silaturahmi dan Halal Bil Halal Sesjen, Sesmen, Sestama Kementerian/Lembaga Kasum TNI dan Asrena TNI – Polri di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.<sup>3</sup>

Tantangan utama yang dihadapi oleh instansi pemerintah saat ini adalah minimnya komunikasi antar lembaga yang mengakibatkan terhambatnya program strategis pemerintah. Selain itu, dinamika serta permasalahan yang dihadapi kementerian/lembaga pemerintah saat ini sangat beragam, salah satunya adalah masih seringnya tumpang tindih kewenangan dan masih lemahnya relasi antar lembaga negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, komunikasi antar lembaga perlu lebih dioptimalkan dalam rangka menyamakan persepsi terkait visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam program Nawacita.

Para Sesjen Kementerian sebagai motor penggerak memegang peranan penting dalam mewujudkan hal tersebut ditengah maraknya distorsi informasi yang berkembang di masyarakat apalagi dihadapkan pada era teknologi 4.0 yang serba digital saat ini. Jabatan Sekretaris Jenderal adalah jabatan yang sangat strategis di dalam Kementerian/Lembaga, untuk itu diperlukan suatu kekompakan sehingga tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dapat terwujud.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Jakarta, 21 Juli 2018

<sup>4</sup> Menteri Perhubungan, Jakarta, 21 Juli 2018

Sesjen adalah *playmaker* di Kementerian masing-masing, di tengah banyaknya tugas dari kementerian di pemerintahan Kabinet Kerja, sangat dibutuhkan satu kekompakan satu dengan lainnya.<sup>5</sup>

Kekompakan dapat terlihat pada studi kasus kedua komunikasi antar kementerian dimana salah satu contohnya nya dari penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018 yang terbilang sukses yang dilaksanakan oleh kementerian perhubungan. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang sangat baik diantara berbagai kementerian/lembaga instansi terkait. Hal ini merupakan salah satu langkah nyata tentang bagaimana sebuah koordinasi/sinergi dapat diwujudkan secara nyata antar kementerian/lembaga. Hal-hal yang menjadi keberhasilan seperti ini kiranya dapat menjadi kebiasaan yang terus dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga dalam menangani permasalahan lain. Dengan demikian, kedepan tidak ada lagi istilah koordinasi hanyalah sebuah kalimat yang mudah diucapkan, namun tidak dapat diimplementasikan.

Dalam angkutan lebaran, bukan hanya Kementerian Perhubungan yang berhasil, namun juga Kementerian/Lembaga lain yang ikut terlibat seperti Kementerian PU, Polri, Kominfo, Kemenkes dan lain sebagainya. Kementerian butuh kebersamaan karena kompetensinya kita saling melengkapi. Tidak mungkin kita menyelesaikan satu pekerjaan itu sendiri.

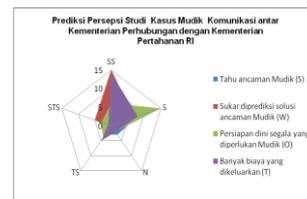
Kementerian Pertahanan sebaiknya diajak ikut serta dalam rangka pertahanan Negara dari sudut sumberdaya pertahanan. Pejalan yang hendak mudik saat lebaran perlu diberikan pertahanan yang kuat dalam segi moral maupun material agar mulai berjalan sampai dengan tujuan melakukan hal-hal pertahanan seperti menjaga diri dari kesakitan, kecelakaan dan kejahatan.

Untuk analisis dari sudut Pertahanan Negara dengan menggunakan prediksi persepsi keterlibatan Kementerian Pertahanan RI pada kegiatan Mudik Lebaran Kementerian Perhubungan dapat terlihat pada

tabel 1 dan hasilnya terlihat pada gambar 1 di bawah ini.

SWOT	SS	S	N	TS	STS
Tahu ancaman Mudik (S)	14	8	3	3	2
Sukar diprediksi solusi ancaman Mudik (W)	15	7	2	1	5
Persiapan dini segala yang diperlukan Mudik (O)	6	15	2	4	3
Banyak biaya yang dikeluarkan (T)	14	8	2	5	1

**Tabel 2. Prediksi Persepsi keterlibatan Kementerian Pertahanan RI pada Kegiatan Mudik Lebaran Kementerian Perhubungan**



**Gambar 2. Diagram Radar Hasil Prediksi Persepsi keterlibatan Kementerian Pertahanan RI**

pada Kegiatan Mudik Lebaran Kementerian Perhubungan.

Studi kasus komunikasi antar kementerian lainnya dilihat dari Rencana Strategis Kementerian Kominfo 2015-2019 bahwa Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

<sup>5</sup> Menteri Perhubungan, Jakarta, 21 Juli 2018

2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015— 2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi seperti pada era digital saat ini (teknologi 4.0).

SWOT	SS	S	N	TS	STS
Tahu ancaman telekomunikasi era tek. 4.0 (S)	14	8	3	3	2
Sukar diprediksi solusi ancaman telekomunikasi era tek. 4.0 (W)	15	7	2	1	5
Persiapan dini segala yang diperlukan (O)	6	15	2	4	3
Banyak biaya yang dikeluarkan (T)	14	8	2	5	1

**Tabel 3. Prediksi Persepsi keterlibatan Kementerian Pertahanan RI pada Kegiatan Telekomunikasi Era Teknologi 4.0 Kemeninfo dengan Kemhan RI**

**Gambar 3. Diagram Radar hasil Prediksi Persepsi keterlibatan Kementerian Pertahanan RI pada Kegiatan Telekomunikasi Era Teknologi 4.0 Kemeninfo dengan Kemhan RI**



**Gambar 4. Renstra tahun 2015-2019**

Sinergi antar kementerian sangat diperlukan dalam aturan penegakan hukum mengenai lingkungan. Kementerian satu dengan yang lainnya tidak alergi dan tidak perlu takut tumpang tindih wewenang dalam menjalankan tugas institusi eksekutif. Sinergi merupakan sebuah masalah, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang program pemerintah<sup>6</sup>.

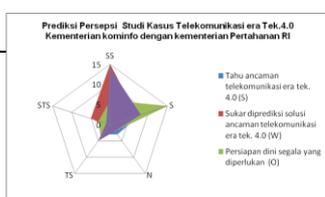
Perlu ada komunikasi antar kementerian. Sinergi itu perlu, tidak boleh dianggap sebagai sebuah masalah, karena campur tangan antara satu dengan yang lainnya. Kita butuh sinergi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

**KESIMPULAN**

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil prediksi persepsi studi kasus di kementerian pertanian sangat setuju dan setuju pada indikator “Tahu

<sup>6</sup> Anggota Komisi IV DPR, Sulaeman L. Hamzah.



Ancaman” sebagai indicator yang dianggap kuat, hal ini ada kemungkinan kementerian pertanian dapat bekerjasama dengan kementerian pertahanan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB).

2. Hasil prediksi persepsi studi kasus di kementerian perhubungan sangat setuju dan setuju pada indikator “Sukar diprediksi solusi ancaman Mudik ” sebagai indikator yang dianggap lemah, hal ini ada kemungkinan kementerian perhubungan dapat bekerjasama dengan kementerian pertahanan dalam kegiatan mudik lebaran 2019.
3. Kementerian pertahanan dapat membantu mencari solusi-solusi yang sukar diprediksi pada saat mudik lebaran 2019
4. Hasil prediksi persepsi studi kasus di Kementerian Kominfo sangat setuju dan setuju pada indikator “Sukar diprediksi solusi ancaman telekomunikasi era tek. 4.0 ” sebagai indikator yang dianggap lemah, hal ini ada kemungkinan kementerian kominfo dapat bekerjasama dengan kementerian pertahanan dalam kegiatan telekomunikasi era teknologi 4.0 kementerian pertahanan dapat membantu mencari solusi-solusi yang sukar diprediksi pada kegiatan telekomunikasi era teknologi 4.0.

DPR,Sinergi antar kementerian sangat diperlukan, 26 Maret 2019

#### REFERENSI

BPPI (Buku Putih Pertahanan Indonesia), Kemhan RI, 2015.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik kemeninfo,Komunikasi dan koordinasi yang optimal antar lembaga pemerintah merupakan kunci per cepatan pembangunan, 22 Juli 2017.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian,

Strategi komunikasi antar kementerian dengan pendekatan “one health”, 23 Mei 2018.